

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hamalik, implementasi ialah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. (Oemar Hamalik, 2017)

Keberhasilan implementasi menentukan apakah keputusan pembuat kebijakan akan berhasil dieksekusi atau tidak, oleh karena itu merupakan tahap penting dalam proses pengambilan kebijakan. (Sasudara Wahyu Lukitasari,dkk, 2017) Intinya, implementasi adalah satu langkah dalam proses pengambilan kebijakan yang memiliki tujuan khusus, termasuk yang jangka pendek dan jangka panjang.

Syaifuddin mengungkapkan bahwa, implementasi di samping dipandang sebagai sebuah proses, implementasi juga di pandang sebagai penerapan sebuah inovasi dan senantiasa melahirkan adanya perubahan

kearah inovasi atau perbaikan, implementasi dapat dilakukan terus menerus sepanjang waktu. Proses implementasi setidaknya ada tiga tahapan atau langkah yang harus dilaksanakan, yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. (Syaifuddin, 2016)

Oleh karena itu, implementasi adalah kegiatan atau pelaksanaan terperinci dari suatu rencana. Implementasi tidak hanya mengacu pada operasi, Implementasi menekankan pada proses yang terencana dan dilaksanakan dengan kewaspadaan. ini juga mengacu pada kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk memenuhi tujuan pembelajaran.

Dari uraian diatas adalah, diperoleh bahwa implementasi adalah suatu yang dilakukan untuk mencapai sebuah perubahan yang di inginkan.

2. Kurikulum Merdeka

Secara etimologis, Istilah kurikulum (*Curriculum*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Curri* yang artinya “Pelari” dan *Curere* yang berarti “Tempat Berpacu”. Istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi Kuno di Yunan. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai ke garis finish. Seiring dengan perkembangan teori dan

praktek pendidikan, istilah kurikulum ialah seperangkat pedoman untuk tujuan, materi pembelajaran, strategi instruksional, dan muara belajar yang memastikan pengambilan prosedur guna melaksanakan mode pembelajaran berhasil dalam mencapai tujuan peningkatan pendidikan. (Yusuf, 2015)

Dalam proses pembelajaran membutuhkan kurikulum yang dapat di jadikan pedoman dalam proses belajar dan mengajar. Pengertian dari kurikulum menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 tentang sistem pendidikan nasional kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Semua dalam kegiatan belajar mengajar telah diatur dalam kurikulum yang telah ditetapkan tersebut sehingga tugas pendidik sebagai pelaksana dan juga dapat mengembangkan kurikulum yang telah ada sesuai kebutuhan peserta didik sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai. (Anwar Hafid ,Dkk, 2013)

Kurikulum merdeka yang dikembangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim sebagai bagian dari agenda kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia (KemendikbudRI). Kurikulum merdeka menawarkan berbagai kesempatan belajar. Kurikulum ini berkonsentrasi pada materi yang paling penting sehingga siswa memiliki waktu untuk mengeksplorasi ide dan mengembangkan keterampilan. Kurikulum merdeka diimplementasikan guna melatih kemerdekaan dalam berpikir. Inti paling penting dari kemerdekaan berpikir ini ditujukan kepada guru. (Khoirurrijal, Fadriati, dkk, 2022)

Kurikulum merdeka disempurnakan dengan menanamkan pendidikan karakter peserta didik melalui profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu: menanamkan sikap taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keberagaman global, gotong royong, kemandirian, berpikir kritis, serta kreativitas. (Hartoyo, 2022) Kurikulum merdeka dianggap sesuai dengan pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sebagai proses pembudayaan sehingga tidak semata – semata terfokus untuk mengembangkan pribadi yang berilmu saja, melainkan juga menyiapkan untuk menjadi masyarakat yang baik. (Irawati, Dini, dkk, 2022)

Melalui kebijakan ini, pemerintah bercita-cita dalam menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil

pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Transformasi yang diusung dalam kebijakan kurikulum merdeka belajar akan terjadi pada kategori ekosistem pendidikan guru, pedagogi, kurikulum, dan sistem penilaian. Ekosistem pendidikan diharapkan menjadi ekosistem yang diwarnai dengan suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi, dan keterlibatan aktif dari orang tua maupun masyarakat serta guru tidak semata-mata hanya sebagai penyampai informasi, melainkan guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran.

Kebijakan merdeka ialah memberikan kemerdekaan bagi setiap unit pendidikan untuk berinovasi. Konsep kurikulum merdeka belajar harus disesuaikan dengan kondisi dalam proses belajar-mengajar, mulai dari segi budaya, kearifan lokal, sosio-ekonomi, maupun infrastruktur. Selain konsep diatas, konsep pelatihan guru akan berubah dari model seminar atau lokakarya menjadi pelatihan yang lebih praktis. Kurikulum yang mudah dipahami dan lebih fleksibel juga menjadi salah satu hal yang diperlukan untuk mendukung implementasi merdeka belajar. Kurikulum Merdeka Belajar dapat mendorong para guru agar dapat memilih materi maupun metode pembelajaran berkualitas tinggi,

namun sesuai dengan tingkat kompetensi, minat maupun bakat masing-masing siswa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka sangatlah memperhitungkan kemampuan individu para siswa. Ada dua poin penting pendidikan, yakni merdeka belajar dan guru peggerak.

3. Karakteristik Kurikulum Merdeka

Karakteristik utama dari kurikulum merdeka belajar yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah: 1) Pembelajaran berbasis projek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila 2) Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.3) Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. (I Komang Wahyu Wiguna,dkk, 2022) Berikut ulasan lebih lanjut terkait karakteristik pembelajaran pada kurikulum merdeka.

a. Pembelajaran Berbasis Projek Yang Sesuai Dengan Profil Pelajar Pancasila.

Projek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan kokurikuler berbasis projek yang disusun dan dirancang untuk menguatkan upaya

pencapaian kompetensi serta karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang secara terpisah dari kegiatan intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan rangkaian kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Sekolah dapat melibatkan peran serta masyarakat dan/atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berbasis proyek mengacu pada hal-hal kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Pembelajaran berbasis proyek menjadi pilihan dalam kurikulum prototipe yang mana dianggap mampu mendukung pemulihan pembelajaran akibat learning loss sebagai pengembangan karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. (Nugraheni Rachmawati, 2022)

b. Berbasis Kompetensi, Fokus Pada Materi Esensial.

Pembelajaran berbasis kompetensi mencakup prinsip-prinsip: (1) Terpusat pada Peserta didik (2) Berfokus pada penguasaan kompetensi, (3) Tujuan pembelajaran spesifik, (4) Penekanan pembelajaran pada unjuk kerja/kinerja, (5)

Pembelajaran lebih bersifat individual, (6) Interaksi menggunakan multi metoda: aktif, pemecahan masalah dan kontekstual, (7) Pengajar lebih berfungsi sebagai fasilitator, (8) Berorientasi pada kebutuhan individu, (9) Umpan balik langsung, (10) Menggunakan modul, (11) Belajar di lapangan (praktek), (12) Kriteria penilaian menggunakan acuan patokan.

c. **Fleksibilitas Bagi Guru Untuk Melakukan Pembelajaran.**

Fleksibilitas pembelajaran diperlukan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep dasar. Adapun tujuan fleksibilitas dalam kurikulum tersebut adalah untuk menjadikan kurikulum lebih relevan dan siap merespons dinamika lingkungan dan beragam perubahan serta untuk memberikan ruang untuk pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. (Fahlevi, 2022)

Pada kurikulum merdeka Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Diferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana siswa mempelajari materi pelajaran berdasarkan kemampuannya, apa yang

mereka sukai, dan kebutuhan individu mereka sehingga mereka tidak frustrasi dan merasa gagal selama proses pembelajaran. (Desy Wahyuningsari, 2022)

4. Prinsip Kurikulum Merdeka

Prinsip-prinsip dalam kurikulum merdeka dirancang untuk memastikan bahwa pendidikan menjadi lebih inklusif, relevan, dan berpusat pada peserta didik. Dengan pendekatan ini, Kurikulum merdeka tidak hanya memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dan guru, tetapi juga mendorong terciptanya pembelajaran yang bermakna dan kontekstual (Kemendikbudristek, 2022). Berikut diantaranya:

a. Berpusat Pada Peserta Didik

Pembelajaran di rancang untuk memenuhi, minat, dan potensi setiap peserta didik, dengan memberikan kebebasan untuk memilih cara dan kecepatan belajar yang sesuai bagi mereka.

b. Fleksibilitas Dalam Pelaksanaan

Satuan pendidikan dan guru diberikan keleluasaan untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kondisi lokal dan karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan kontekstual.

c. Berbasis Kompetensi

Kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan kompetensi inti yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia nyata.

d. Integrasi Profil Pelajar Pancasila

Pembelajaran dirancang untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila, seperti beriman, berakhlak mulia, kreatif, berpikir kritis, dan peduli sesama.

5. Struktur Kurikulum Merdeka

Secara umum strukturnya terbagi menjadi tiga, yakni kegiatan intrakurikuler, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang dikenal dengan P5, serta ekstrakurikuler (Dini Irawati, 2022). Kegiatan intrakurikuler ini merupakan proses untuk menyelesaikan hasil belajar yang dilakukan di kelas, yaitu proses belajar mengajar. Dalam hal ini, guru diberikan kebebasan dalam mengembangkan program kerjanya dalam mengajar.

Sedangkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) ialah proyek lintas disiplin ilmu yang dilakukan dari berbagai mata pelajaran yang terdapat di lembaga Pendidikan (Hamidah, (2022)). Alokasi waktu jam pelajarannya ditulis secara keseluruhan selama

setahun dan disertai alokasi waktu setiap minggunya. Sebenarnya tidak ada perubahan dalam total jumlah jam pelajarannya, melainkan setiap mata pelajaran dialokasikan waktunya untuk kegiatan intrakurikuler dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), dengan rincian 75% pembelajaran intrakurikuler dan 25% untuk kegiatan P5 (Kemendikbud, 2022)

6. Keunggulan Kurikulum Merdeka

Ada beberapa keunggulan dari Kurikulum Merdeka diantaranya adalah:

a. Lebih Sederhana dan Mendalam

Kurikulum Merdeka Belajar lebih fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya.

Sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, mendalam, dan bermakna.

b. Lebih Merdeka

Kurikulum Merdeka Belajar membuat guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan dari peserta didik. Selain guru, sekolah penyelenggara juga memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.

c. Lebih Relevan dan Interaktif

Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil

Pelajar Pancasila. (Dwi Nurani,dkk, 2020)

7. Perangkat Ajar pada Kurikulum Merdeka

Ada tiga perangkat ajar yang baru dikembangkan dalam Kurikulum

Merdeka Belajar, yaitu:

- a. Modul ajar merupakan pengembangan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dilengkapi dengan panduan yang lebih terperinci, termasuk lembar kegiatan siswa dan assesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan modul ajar diharapkan proses belajar peserta didik menjadi lebih fleksibel karena tidak tergantung pada konten dalam buku teks, kecepatan serta strategi pembelajaran juga dapat sesuai dengan peserta didik, sehingga diharapkan setiap peserta didik dapat mencapai kompetensi minimum yang ditargetkan.
- b. Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) atau urutan pembelajaran adalah komponen untuk menyusun

silabus. Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) diharapkan dapat membantu satuan pendidikan dan pendidik mengembangkan langkah-langkah atau alur pembelajaran berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP) yang telah ditetapkan.

- c. **Projek penguatan Profil Pelajar Pancasila.** Profil Pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih, dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Profil Pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler (Maman firmansyah, 2022)

8. Pendidikan Agama Islam

Makna pendidikan dalam Islam lebih bersifat universal. Pendidikan Agama Islam memikul beban amanah yang sangat berat, yaitu memberdayakan potensi fitrah manusia yang condong kepada nilai-nilai kebenaran dan keutamaan agar ia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba, yang siap melaksanakan amanat yang ditugaskan kepadanya, yaitu "khilafah fil ardl". Oleh karena itu, makna Pendidikan Agama Islam adalah

“segala upaya memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (Insan Kamil) sesuai dengan norma-norma Islam. (Ahmadi, 2014)

Agama yang ajarannya menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul adalah Islam. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam atau makhluk lain yang berhubungan dengan bidang aqidah, syari'at dan moral. (Abu ahmadi dan Nur Uhbiyati, 2001) Ali Hasan mendefinisikan Agama Islam sebagai meyakini akan keselamatan dan kebahagiaan bagi manusia yang diwahyukan oleh Allah melalui utusan para Rasul. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SA, diwahyukan dalam Al-Qur'an dan dinyatakan dalam Sunnah berupa petunjuk, perintah dan larangan untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat. (Aminuddinetal, 2014)

Jadi Pendidikan Agama Islam adalah suatu upaya berupa pengajaran, bimbingan dan pengasuhan kepada anak agar kelak setelah menyelesaikan pendidikannya dapat memahami, menghayati dan mengamalkan Islam, serta menjadikannya sebagai pedoman hidup, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. (Aat Syafaat, 2008)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Agama Islam upaya untuk membentuk kepribadian yang mengamalkan ajaran-ajaran islam sesuai dengan norma-norma islam.

9. Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang menekankan pada fleksibilitas, diferensiasi pembelajaran, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini dirancang agar guru dapat menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya ditentukan oleh isi dan tujuan kurikulum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung di lingkungan pendidikan. Salah satu faktor yang memegang peranan penting adalah ketersediaan sarana dan prasarana, karena tanpa adanya fasilitas yang memadai, guru dan peserta didik akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Sarana dan prasarana merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan pendidikan. Oemar Hamalik (2008) menjelaskan bahwa lingkungan belajar yang memadai, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana, berpengaruh langsung terhadap kualitas hasil belajar siswa. Senada dengan itu, Suharsimi Arikunto (2003) membedakan sarana pendidikan sebagai segala

peralatan, bahan, dan perlengkapan yang digunakan langsung dalam proses pembelajaran, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang, seperti gedung sekolah, ruang kelas, dan fasilitas umum. Pemisahan ini menegaskan bahwa keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung keberlangsungan pembelajaran.

Dalam konteks Sekolah Luar Biasa (SLB), ketersediaan sarana dan prasarana memiliki makna yang lebih mendalam. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan fasilitas yang sesuai dengan kondisi mereka agar dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Misalnya, anak tunarungu memerlukan media visual dan alat bantu pendengaran, sedangkan anak tunagrahita lebih terbantu dengan media konkret dan sederhana. Tanpa dukungan fasilitas ini, guru akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan berhak memperoleh sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal untuk menunjang proses pembelajaran. Amanat undang-undang ini menunjukkan bahwa sarana prasarana bukan hanya kebutuhan teknis,

melainkan bagian dari hak setiap peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana adalah fondasi yang tak terpisahkan dari implementasi Kurikulum Merdeka. Keberadaannya menjadi kunci utama keberhasilan guru dalam merancang pembelajaran yang fleksibel, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sarana dan prasarana tidak dapat dilepaskan dari kajian tentang anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Peserta didik dengan karakteristik tertentu memerlukan perhatian lebih, baik dari segi metode pembelajaran maupun fasilitas pendukung yang tersedia di sekolah.

10. Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Berkaitan dengan istilah *Disability*, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti autisme dan ADHD. Pengertian lainnya bersinggungan dengan istilah tumbuh-kembang normal dan abnormal, pada anak

berkebutuhan khusus bersifat abnormal, yaitu terdapat penundaan tumbuh kembang yang biasanya tampak di usia balita seperti baru bisa berjalan di usia 3 tahun. Hal lain yang menjadi dasar anak

tergolong berkebutuhan khusus yaitu ciri-ciri tumbuh-kembang anak yang tidak muncul (*Absent*) sesuai usia perkembangannya seperti belum mampu mengucapkan satu katapun di usia 3 tahun, atau terdapat penyimpangan tumbuh-kembang seperti perilaku *Echolalia* atau membeo pada anak autis. (Endang Widyorini,dkk, 2014)

Menurut Efendi Istilah berkebutuhan khusus secara eksplisit ditujukan kepada anak yang dianggap mempunyai kelainan/penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya,dalam hal fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya. (Nandiyah Abdullah, 2013)

Berdasarkan pengertian tersebut anak yang dikategorikan berkebutuhan dalam aspek fisik meliputi kelainan dalam indra penglihatan (Tunanetra) kelainan indra pendengaran(Tunarungu) kelainan kemampuan berbicara (Tunawicara) dan kelainan fungsi anggota tubuh (Tuna daksa). Anak yang memiliki kebutuhan dalam aspek mental meliputi anak yang memiliki kemampuan mental lebih (Supernormal) yang dikenal

sebagai anak berbakat atau anak unggul dan yang memiliki kemampuan mental sangat rendah (Abnormal) yang dikenal sebagai tuna grahita. Anak yang memiliki kelainan dalam aspek sosial adalah anak yang memiliki kesulitan dalam menyesuaikan perilakunya terhadap lingkungan sekitarnya. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dikenal dengan sebutan Tunalaras.

Berdasarkan uraian diatas dapat di ambil pengertian bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang adanya gangguan perkembangan atau kelainan yang dialami dan memiliki keterbatasan disalah satu atau di beberapa kemampuan baik itu bersifat fisik anak tersebut.

B. Kajian Pustaka

Untuk membantu proses penyusunan skripsi ini maka penulis melakukan penelusuran dan pengamatan terhadap beberapa literature pustaka terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian, antara lain:

1. Putri Prima Yani (2022) melakukan penelitian mengenai implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI untuk anak berkebutuhan khusus pada masa pandemi Covid-19 di SLBN Bukit Barisan Karbela. Fokus penelitian tersebut menyoroti bagaimana guru mengelola pembelajaran PAI bagi siswa ABK dengan keterbatasan situasi pandemi. Hasilnya menunjukkan bahwa

meskipun terdapat berbagai kendala, proses pembelajaran tetap berjalan dengan adaptasi tertentu. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa implementasi kurikulum pada ABK memerlukan strategi khusus, terutama ketika dihadapkan pada kondisi darurat.

2. Indah Fitriya (2022) meneliti implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI bagi anak berkebutuhan khusus di Lembaga Kursus dan Pelatihan Quali Internasional Surabaya. Penelitian ini menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kurikulum Merdeka, tetapi objek penelitian berbeda karena Fitriya meneliti lembaga non-formal, sedangkan penelitian ini dilakukan di SLB Negeri 3 Bengkulu.
3. Azizunni Hidayati Wahyuni (2023) Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di Slb 1 Ngawi Vol 8 No 7. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bagaimana penerapan kurikulum dilakukan di tingkat dasar bagi ABK, dengan tantangan utama berupa keterbatasan pemahaman guru dan sarana pembelajaran. Persamaannya dengan penelitian ini

adalah sama-sama meneliti Kurikulum Merdeka untuk ABK, namun lokasi dan subjek berbeda.

4. Nizar Farhami dan Khairul Umam (2023) melalui penelitian berjudul Strategi Pembelajaran PAI Kurikulum Merdeka bagi ABK di SLB Sabilillah Cukir Diwek Jombang. Hasilnya menekankan pada strategi khusus yang digunakan guru PAI dalam mengajar ABK dengan pendekatan Kurikulum Merdeka, yang menegaskan perlunya inovasi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik
5. Ismatun Nihayah (2023) tentang Implementasi Pembelajaran PAI pada Sekolah Inklusi di SDN 1 Mojokerto menunjukkan bahwa penerapan PAI dalam konteks inklusi juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam menyeimbangkan kebutuhan siswa reguler dengan ABK.

Peneliti	Judul	Tahun	Universitas/ Fakultas/Prodi	Persamaan	Perbedaan

Putri Prima Yani	Implementasi Kurikulum K13 dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk anak berkebutuhan khusus pada masa pandem covid-19 di SLBN Bukit Barisan Karbela	2022	UIN Fatmawati Sukarno Putri Bengkulu/Tarbiyah dan Tadris/Pendidikan Agama Islam	Mengkaji pembelajaran pendidikan agama islam pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Dalam penelitian ini fokus ke Kurikulum K13
Indah Fitriya	Implementasi kurikulum merdeka dalam PAI bagi anak ABK dilembaga kursus dan Peatihan Quali Internasional Surabaya	2022	UIN Sunan Ampel Surabaya/Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam	Sama sama meneliti tentang implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran PAI	Tertuju dalam penerapan guru agama dalam mengajar PAI kepada ABK

Azizunni Hidayati Wahyuni	Jurnal:Implementas i Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di Slb 1 Ngawi Vol 8 No 7	2023	STIT Islamiyah KP Paron Ngawi	Sama sama meneliti tentang implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran PAI	Fokus penelitian Jurnal terdapat pada implement asi strategi kurikulum secara umum di tingkat SMA
Nizar Farhami, Khairul Umam	Jurnal:Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kurikulum Merdeka Bagi ABK di SLB Sabilillah Cukir Diwek Jombang Vol 2 No 4	2023	Universitas Hasyim Asy'ary	Sama –Sama meneliti Tentang Kurikulum Merdeka	Penelitian tersebut berfokus pada strategi pembelajar an Pendidikan Agama Islam.

Ismatun Nihayah	Jurnal;Impelementasi pembelajaran PAI pada sekolah Inklusi di sekolah Inklusi SDN 1 Mojokerto Vol 11 No 2	2023	Universitas Pesantren Kh.Abdul Chalim	Sama-sama meneliti tentang implementasi Pembelajaran PAI	Penelitian tersebut berfokus meneliti di sekolah umum
-----------------	---	------	---------------------------------------	--	---

C. Kerangka Berpikir

Setiap peralihan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan salah satu yang menjadi ciri khas ialah pergantian kurikulum. Dari setiap pergantian pasti terdapat perubahan kurikulum. Di Indonesia pergantian kurikulum terjadi dalam kurun waktu tahun 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan 2013. Dalam setiap perubahan yang terjadi pola dalam pelaksanaannya-pun akan berbeda dan hal ini terkadang akan membuat masalahh dalam melaksanakan pendidikan.

Kurikulum merupakan sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi, dan pengalaman belajar yang harus

dilakukan oleh siswa, strategi, dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Perubahan kurikulum pastinya akan berdampak pada proses pendidikan formal, karena harus menyesuaikan segala bentuk perubahan ataupun penyempurnaan dalam kurikulum. Bila yang dalam taraf pendidikan formal untuk siswa normal mengalami penghambatan apalagi bagi sekolah yang dikhususkan untuk murid yang memiliki kebutuhan khusus, misalnya tunagrahita. Perubahan yang terjadi tentu akan mengalami dinamika serta proses yang panjang agar dapat menyesuaikan kurikulum yang telah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Kurikulum Merdeka yang direncanakan oleh Kemendikbudristek Dikti tersebut kabarnya membuat kabar gembira bagi sekolah yang memiliki kebutuhan khusus, lantaran Kurikulum Merdeka yang diterapkan disesuaikan dengan pendidikan bangsa dan proses pengambilanya dalam falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara. Meski demikian proses implementasi Kurikulum Merdeka perlu untuk diurai pula agar proses pembelajaran bagi para peserta didik kebutuhan khusus.

Dalam kurikulum terdapat komponen tujuan, materi, strategi dan evaluasi.

Gambar 2.1
Bagan Krangka Berfikir

